

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM BIDANG EKONOMI DI KELEMBAGAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh
HERLINTATI

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi daerah merupakan perubahan ke arah yang lebih baik bidang ekonomi yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan dunia usaha baru dalam rangka meningkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi dan peran perempuan dalam perumusan kebijakan dan mengetahui partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode survey dengan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap subyek informasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dan partisipasi perempuan pada posisi pimpinan yang menentukan kebijakan/keputusan rencana pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah masih relatif lemah, Kurangnya akses keterlibatan perempuan dalam perumusan program disebabkan oleh faktor komposisi perempuan pada tingkat jabatan struktural yang ada di kelembagaan, kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan perempuan dalam akses perumusan program, penetapan program dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kemampuan dan partisipasi perempuan dalam merespon usulan masyarakat dalam pembangunan ekonomi pada kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah masih relatif terbatas. Kemampuan perempuan dalam menanggapi usulan bawahan mengenai program dan anggaran pembiayaan dalam pembangunan ekonomi di kelembagaan relatif masih lemah. Masih rendahnya komposisi kaum perempuan pada jabatan struktural di kelembagaan daerah ternyata membatasi akses kemampuan, kewenangan dan kekuasaan perempuan untuk mempengaruhi keputusan dalam perumusan kebijakan yang diusulkan. Kemampuan kaum perempuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan program yang diusulkan masih lemah atau belum optimal. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah masih rendah.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Perumusan Kebijakan, Pembangunan Ekonomi.

WOMEN'S PARTICIPATION IN THE FORMULATION OF INSTITUTIONAL POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY

**By
HERLINTATI**

ABSTRACT

Regional economic development is a change for the better, the economy that includes the establishment of new institutions, the development of alternative industries, improving the capacity of the existing workforce to produce products and services better, identifying new markets, transfer of knowledge and development of new businesses in order to improve the economic and social welfare.

Purpose of this study was to determine the participation and role of women in policy formulation and knowing participation of women in economic development policy

Institutional study was conducted in Lampung district center. research conducted by survey method with the method of collecting data through interview techniques on the subject of information and documentation

The results showed that the capacity and participation of women in leadership positions who determine the policy / decision-economic development plans in the region is still relatively weak institutions, lack of access to women's involvement in the formulation of the program due to the composition of factors on the structural position of women in institutions, lack of knowledge, experience and capabilities of women in the formulation of program access, program establishment and implementation of economic development programs at the institutional center of Lampung regency. The results showed that the capacity and participation of women in leadership positions who determine the policy / decision-economic development plans in the region is still relatively weak institutions, lack of access to women's involvement in the formulation of the program due to the composition of factors on the structural position of women in institutions, lack of knowledge, experience and capabilities of women in the formulation of program access, program establishment and implementation of economic development programs at the institutional center of Lampung regency. Ability and women's participation in responding to proposals from the community in economic development in the institutional area in Lampung regency was still relatively limited. ability in response to the proposed program and budget of the subordinate financing in economic development is still relatively weak institutions. The low composition on the structural position of women in local institutions turned out to limit the access capability, authority and power of women to influence decisions in the formulation of the proposed policy. Women's ability to defend and fight for the proposed program is still weak or not yet optimal. Based on these results concluded that women's participation in the formulation of economic policy in the institutional area of Lampung regency was still low.

Key words: Women's Participation, Policy Formulation, Economic Development

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, dominasi pelaku pembangunan atau sebagai subyek pembangunan tidaklah semata-mata berada pada kaum laki-laki. Perempuan juga merupakan suatu aspek sumber daya yang potensial bilamana keberadaannya diberdayakan secara optimal. Begitu pula dari sejarah perkembangan dunia maupun perkembangan bangsa telah membuktikan bahwa kaum perempuan mampu memiliki peran dan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana layaknya laki-laki.

Keterwakilan perempuan di kelembagaan daerah di setiap Kabupaten/Kota dewasa ini relatif cukup besar. Oleh karena itu keberadaan kaum perempuan pada setiap perangkat kerja pemerintahan daerah diharapkan mampu juga sebagai pelopor dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam meningkatkan peran perempuan dibidang pemerintahan dan pembangunan yang selama ini dianggap bukan sebagai persoalan penting. Pada konteks perumusan kebijakan daerah terutama menyangkut pembangunan daerah, diskriminasi gender seringkali dilanggengkan oleh para pembuat kebijakan, dimana keputusan-keputusan dibuat kurang berprespektif gender. Keberadaan kaum perempuan yang minoritas pada suatu lembaga pemerintahan seringkali kalah mengimplikasikan suaranya dalam perumusan kebijakan. Kondisi ini tentunya harus menjadi sebuah dorongan bagi setiap kaum perempuan menempatkan diri dan memiliki peran serta fungsi dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana layaknya laki-laki, karena pada situasi dan tingkatan tertentu kaum perempuan memiliki pengetahuan, ketarampilan/kecakapan

serta ketegasan yang sama dengan laki-laki.

Seiring dengan semakin banyaknya perempuan yang melibatkan diri dalam aktivitas sosial, dalam kelembagaan pemerintah, organisasi formal maupun organisasi non formal dan pada sektor swasta dalam kewirausahaan, peran perempuan ditengah-tengah kehidupan sosial dewasa ini tidak hanya sebagai alat produksi dalam melahirkan generasi penerus sebagaimana kodrat hakiki yang dimiliki kaum perempuan. Lebih dari pada itu perempuan dengan kodrat alamiahnya telah mampu pula menempatkan diri sebagai asset bangsa/daerah dan asset pembangunan, dimana kemampuan dan perannya dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki. Berdasarkan hasil survey BPS Provinsi Lampung Tahun 2011 bahwa untuk jumlah perempuan di Kabupaten Lampung Tengah adalah berkisar 41,7% dari jumlah penduduk laki-laki. Melihat besarnya jumlah penduduk perempuan tersebut tentunya akan menjadi asset pembangunan daerah yang besar apabila keberadaannya dimanfaatkan secara baik dalam mendorong laju pembangunan di daerah tersebut.

Akibat dari peningkatan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan serta modernisasi juga akibat pergeseran nilai

adat istiadat primordial yang mengikat hak-hak dan ruang gerak kaum perempuan), peran perempuan di Kabupaten Lampung Tengah tidak lagi semata-mata sebagai pelayan bagi suami dan mengurus rumah tangga. Perempuan di daerah tersebut dengan keberadaannya telah ikut serta menunjukkan kapasitas dirinya dalam berperan di berbagai bidang, termasuk dalam kelembagaan pemerintahan di daerah. Hal ini tampak pada komposisi jumlah perempuan yang keberadaannya di lembaga pemerintahan hampir sama atau sebanding dengan jumlah laki-laki, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Data Komposisi (Jumlah) Tenaga Kerja (Pegawai) Wanita Pada Kelembagaan Daerah (Satker) Kabupaten Lampung Tengah.

No	Nama Kantor/Satuan Kerja	%			Jumlah Total
		Laki	Wanita	% Wanita	
1	Setda Kabupaten Lamteng	138	98	41,5	236
2	Badan Kepegawaian Daerah	54	43	43,9	98
3	Dinas Pendidikan	118	47	37,6	125
4	Dinas Kesehatan	47	56	54,4	103
5	Dinas Pendapatan Daerah	101	39	27,9	140
6	Dinas Pertambangan & Energi	58	27	31,8	85
7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata.	53	23	30,3	76
8	Dinas Perternakan	56	37	39,8	93
9	Dinas Pasar dan Perdagangan	56	31	35,6	87
10	Dinas Pertanian dan Hortikultura	68	38	35,8	106

11	Dinas Pedudukan dan Catatan Sipil	105	40	27,6	145
12	BPPPP dan Keluarga Berencana	51	37	42,1	88
13	DP2KA	77	31	28,7	108
14	Badan Pemberdayaan Kampung	69	34	33,0	103
15	Dinas Koperasi dan UKM	71	28	28,3	99
16	Badan penanggulangan Bencana	92	16	14,8	108
17	Kantor Kesbanglinmas	67	31	31,6	98
18	Badan Pelayanan Terpadu	64	23	26,4	87
19	Kantor Satpol- PP	168	69	29,1	237
20	Kecamatan (28 Kecamatan) + UPTD	7.908	4.992	39,0	12.800
	Jumlah	9.421	5.740	37,86	15.161

Sumber: Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Sesuai dengan kodrat alamiah yang dimilikinya, perempuan masih dianggap memiliki keterbatasan gender dibanding laki-laki. Oleh sebab itu posisi perempuan di berbagai bidang, khususnya di kelembagaan daerah masih belum sepenuhnya disetarakan dengan laki-laki. Kondisi tersebut terjadi pula di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Keberadaan perempuan di kelembagaan daerah dengan tingkat kualitas dan kuantitasnya yang ada belum mampu menempatkan wanita pada posisi yang sama dengan laki-laki. Sebagian besar yang memangku jabatan pada unit dan instansi pemerintahan adalah kaum laki-laki dan hanya sedikit perempuan yang diberikan

kesempatan atau kepercayaan untuk duduk sebagai pimpinan pada tingkat eselon atau satuan kerja tertentu, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi (Jumlah) Tenaga Kerja (Pegawai) Wanita dalam Tingkatan Jabatan (Eselon) Di Kelembagaan Daerah (Satuan Kerja Daerah) Kabupaten Lampung Tengah.

No	Tingkatan Eselon Jabatan/Kepangkatan	Jumlah Pemegang Eselon			Jumlah Total
		Laki	Wanita	% wanita	
1	Eselon II	20	1	4,7	21
2	Eselon III	113	17	13,1	130
3	Eselon IV	316	79	20,0	395
	Jumlah	449	97	17,8	546

Sumber: Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Rumusan Masalah

1. Mengapa perempuan belum sepenuhnya berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Sejauhmanakah partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komposisi wanita sebagai pimpinan di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam perumusan

kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah.

4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penerapan otonomi daerah yang berkaitan dengan peningkatan potensi sumber daya daerah khususnya peningkatan peran wanita sebagai *asset* bagi pembangunan daerah.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam peningkatan gender dan peran wanita dikelembagaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah sehingga tercapainya pemerataan pembangunan di segala bidang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan dengan keadaan lahiriah seseorang terhadap sesuatu hal. Partisipasi dapat diberikan dalam bentuk sumbangan pemikiran, tenaga atau dalam bentuk materiil

terhadap suatu kegiatan atau keadaan tertentu yang melihat seorang individu didalamnya.

Selanjutnya Winardi (2002:149) mendefinisikan partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan pada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut. Partisipasi mengarahkan individu untuk terlibat secara mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi perempuan adalah suatu bentuk keterlibatan perempuan secara mental dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga, fikiran maupun materiil guna tercapainya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai.

Verhangen dalam Mardikanto (2003:84) menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk khusus dari interaksi

dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan ini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan.

2. Kelembagaan Daerah

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal atau seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara di gunakan istilah *Political instruction*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara atau organ negara.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya

dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau *ranking* kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya Lembaga-Lembaga Negara ada yang bersifat utama/primer (*primary constitutional organs*), dan bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*).

3. Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Menurut pendapat Ermaya Suradinata (1994:2) proses perumusan kebijaksanaan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi, yaitu identifikasi masalah tentang kebijaksanaan melalui permintaan publik terhadap aksi-aksi pemerintah.
- 2) Formulasi, yaitu formulasi masalah-masalah yang dalam masyarakat, kemudian diformulasikan kedalam bentuk proposal dan dalam hal ini ditangani oleh organisasi perencanaan kebijaksanaan dan birokrasi pemerintah, Kepala Negara beserta kongres.
- 3) Legitimasi, yaitu setelah proposal diolah dan diformulasikan, kemudian dilegitimasi (disahkan) oleh partai-partai, kelompok kepentingan, Presiden dan kongres.
- 4) Implementasi, yaitu setelah proposal disahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian dilaksanakan oleh birokrasi yang terorganisasi, pengeluaran publik dan aktivitas dari agen-agen eksekutif.
- 5) Evaluasi, yaitu mengevaluasi dari kebijaksanaan yang dilakukan oleh agen-agen Pemerintah sendiri,

Pengawas/Konsultan dari luar, wartawan dan masyarakat.

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Hal ini berkenaan dengan kenyataan bahwa tanpa pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, hal ini sejalan dengan pendapat Udoji dalam Wahab (1997:59):

“Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

4. Pembangunan Ekonomi Daerah

Lincoln Arsyad dalam Herry Darwanto (2000: 31) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Mardalis (2003:26) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada saat ini dan melihat kaitan antara faktor-faktor yang ada. Penelitian deskriptif mencoba memetakan dan mengklasifikasikan informasi yang didapat menjadi suatu bentuk penyajian yang sistematis mengenai suatu permasalahan.

2. Pokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada beberapa aspek penelitian sebagai berikut:

1. Kemampuan perempuan menanggapi usulan dari masyarakat mengenai usulan kegiatan, usulan pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.
2. Kemampuan perempuan menanggapi usulan dari bawahan mengenai usulan kegiatan, usulan pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.

3. Kemampuan perempuan membuat usulan untuk kegiatan, pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.
4. Kemampuan perempuan dalam mempertahankan atau memperjuangkan usulan-usulan yang diajukan di kelembagaan daerah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara intensif;

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan bertanya langsung kepada informan. Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

- b. Studi Dokumen;

Studi dokumen dilakukan dengan meneliti dan melihat keadaan di lapangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

5. Subyek/Sumber Informasi

Subyek dan sumber informasi adalah menunjukkan dimana seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh. Subyek dan sumber informasi dalam penelitian ini

adalah seluruh pegawai perempuan yang menduduki jabatan Eselon II, III dan IV pada Kelembagaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 97 orang, yaitu: perangkat/satuan kerja Pemda Kabupaten Lampung Tengah.

6. Teknik Pengolahan Data

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memilih data sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu melihat jenis dan hubungannya dengan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Penyusunan data, yaitu melakukan penempatan data pada posisi pokok bahasan yang disusun secara sistematis untuk memudahkan memperoleh pengertian data tersebut.

7. Metode Analisis

Analisa data penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis terhadap data dan informasi yang dilakukan dengan cara memaparkan, menggambarkan dan menafsirkan data hasil penelitian dengan susunan kalimat

sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

D. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Lampung Tengah saat ini memiliki wilayah administratif yang terdiri dari 28 Kecamatan definitif yang terdiri dari 10 Kelurahan dan 283 Desa. Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di Bagian Tengah Provinsi Lampung memiliki luas areal darata lebih kurang 4.789,82 Km persegi.

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah Kabupaten yang cukup luas dan besar, luas dan besarnya wilayah Kabupaten Lampung Tengah merupakan aset daerah yang apabila mampu dimanfaatkan/ difungsikan secara baik akan mendorong laju/perkembangan wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada kondisi yang lebih baik dimasa datang. Wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 Kecamatan.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah adalah sebanyak 1.109.882 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki = 579.852 jiwa dan perempuan 530.030 jiwa (91,4% dari jumlah penduduk laki-laki). Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 1,08% pertahun, dengan kepadatan penduduk 238 jiwa per Km².

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemampuan Perempuan dalam Menanggapi Usulan Program Pembangunan Ekonomi oleh Masyarakat di Kelembagaan Daerah.

Fenomena tentang keterbatasan kemampuan perempuan dalam menanggapi usulan yang diajukan masyarakat di kelembagaan daerah menunjukkan bahwa akses perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah relatif masih rendah. Walaupun Pemerintah melalui Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Daerah meningkatkan peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah namun dalam kenyataannya komposisi dalam kelembagaan daerah yang menempatkan perempuan sebagai perumus kebijakan relatif masih terbatas. Kondisi ini tentunya menjelaskan bahwa akses perempuan untuk memiliki kemampuan dalam menanggapi usulan masyarakat Lampung Tengah dibidang pembangunan ekonomi masih rendah.

Sebagai salah satu aset daerah dan aset bangsa dibidang sumber daya manusia seharusnya keberadaan dan peran perempuan di Kelembagaan

Daerah pada Kabupaten Lampung Tengah semakin ditingkatkan. Kemampuan perempuan saat ini yang tidak kalah hebatnya dari kaum laki-laki dalam hal pengetahuan, kecakapan dan keterampilan berfikir atau memutuskan suatu kebijakan/masalah merupakan potensi besar bagi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan peran dan komposisi perempuan pada level atau kelompok penentu kebijakan harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan jumlah SDM perempuan yang hampir sebanding dengan laki-laki dalam kuantitas maupun kualitas pada struktur pemerintahan daerah memberikan potensi yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah untuk melibatkan perempuan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kemampuan perempuan dalam menanggapi usulan kegiatan dan usulan anggaran pembiayaan program pembangunan ekonomi oleh bawahan di Kelembagaan Daerah.

Kesetaraan gender adalah faktor intrinsik dari tiap pembangunan, oleh karena itu peran perempuan dalam

pembangunan daerah tidak dapat dipungkiri dan dipandang sebelah mata. Disadari atau tidak peningkatan peranan yang ditunjukkan wanita baik dalam bidang ekonomi maupun sosial menjadi fakta yang harus diakui bahwa sebenarnya kaum perempuan atau wanita harus diperlakukan secara wajar dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam setiap sendi kehidupan. Padahal selama ini masih terdapat orang-orang tertentu yang menganggap wanita memiliki banyak sisi kelemahan dalam masyarakat maupun dalam keluarga, jika dibanding dengan kaum lelaki. Kaum perempuan disetiap tempat saat ini telah mampu meningkatkan eksistensinya dalam menyara ekonomi keluarga, mendidik anak-anaknya dan berperanan dalam aktiviti kemasyarakatan. Keragaman tugas dan posisi yang dijalankan perempuan menunjukkan betapa besar tanggungjawab yang dilakukan wanita. Perempuan tidak lagi hanya berperanan sebagai suri rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperanan dalam pelbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun bidang-bidang lainnya.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah yang sedang dan selalu membangun bidang dan sendi-sendi tatanan perekonomian masyarakat dan daerah. Oleh sebab itu sumber tenaga manusia yang berpotensi harus dapat dimanfaatkan untuk terus berkembang. Demikian juga halnya dengan kaum wanita yang jumlahnya di kelembagaan daerah hampir sebanding dengan laki-laki, merupakan sumber manusia yang berpotensi seperti halnya kaum lelaki yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal dasar dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Partisipasi perempuan dalam perumusan usulan kegiatan/program dan pembiayaan pembangunan ekonomi di Kelembagaan Daerah.

Aspek terpenting dalam penyusunan rencana pembangunan ekonomi di kelembagaan Daerah adalah menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan. Penentuan skala prioritas dimaksudkan untuk menyelaraskan rencana dengan tingkat kebutuhan paling penting yang mendesak untuk diutamakan dalam rencana pembangunan. Sedangkan penentuan sasaran adalah menetapkan tujuan-tujuan

yang akan dicapai dari pembangunan yang akan direncanakan, sekaligus manfaat atas hasil pembangunan tersebut. Pada prinsipnya perencanaan pembangunan ekonomi oleh Kelembagaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan dapat diaplikasikan berbagai sektor pembangunan ekonomi daerah. Penetapan skala prioritas pembangunan ekonomi oleh Kelembagaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan memadukan berbagai aspirasi baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Penetapan prioritas pembangunan ekonomi oleh Kelembagaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah memprioritaskan pada sasaran pembangunan daerah yang berkesinambungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan serta keselarasan dengan lingkungan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan mencapai hasil-hasilnya bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Aspek-aspek pembangunan ekonomi oleh Satuan Kerja Kabupaten Lampung Tengah antara lain adalah:

1. Peningkatan kebijakan pelayanan perizinan yang prima kepada warga masyarakat guna membuka peluang usaha dan meningkatkan minat

investor domestik maupun penanaman modal asing guna mendukung percepatan pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pembinaan dan penyaluran bantuan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan usaha produktif masyarakat, meningkatkan ekonomi keluarga dan pengentasan kemiskinan masyarakat.
3. Pengadaan sarana dan prasarana fisik yang mendorong peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah dari sektor pajak dan retribusi.
4. Pelaksanaan pelatihan kerja dan pembinaan keterampilan kerja guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang usaha produksi dan jasa untuk mendongkrak kemampuan ekonomi daerah dalam berbagai sektor perekonomian yang selaras dengan potensi daerah.
5. Pelaksanaan program pengembangan serta pengelolaan potensi dan sumber daya alam Kabupaten Lampung Tengah yang dapat meningkatkan roda perekonomian daerah.

4. Kemampuan perempuan dalam mempertahankan/memperjuangkan usulan dan program pembangunan ekonomi di Kelembagaan Daerah.

Keterlibatan perempuan pada berbagai kegiatan dalam pengajuan usulan program membuka akses perempuan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kelembagaan Daerah. Namun demikian dengan jumlah pejabat struktural di pemerintahan daerah yang relatif kecil/sedikit, tentunya kemampuan perempuan dalam memperjuangkan suatu usulan kegiatan masih lemah. Begitu juga dalam hal kewenangan dan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan dalam perumusan kebijakan yang diusulkan. Komposisi perempuan yang masih terbatas dalam hal perannya sebagai pemimpin pada jabatan strategis di kelembagaan daerah membuat akses dan kemampuan mempertahankan dan memperjuangkan suatu usulan program menjadi tidak sepenuhnya optimal. Dalam Musrenbang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 terlihat bahwa tingkat keikutsertaan perempuan hanya sebesar 16,7 persen dari peserta Musrenbang, dan dari jumlah tersebut perempuan yang menjabat sebagai pimpinan (pejabat) di tingkat Eselon II hanya 2 orang, yaitu Kepala Badan

Pemberdayaan perempuan, P3 dan Kepala Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk Badan/Kantor/Dinas/Instansi selebihnya dipimpin oleh laki-laki.

Dominasi kaum laki-laki sebagai pemegang jabatan struktural sedikit banyak telah memandulkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dan dinamis dalam menetapkan kebijakan di kelembagaan daerah. Pada akhirnya dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan di kelembagaan daerah, sampai saat ini masih tetap menempatkan kaum perempuan dalam posisi sebagai obyek dari suatu kebijakan daripada sebagai subjek dari sebuah kebijakan Kelembagaan Daerah dibidang pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah.

F. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan dan partisipasi perempuan dalam merespon usulan masyarakat dalam pembangunan ekonomi pada kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah masih relatif lemah. Kurangnya akses

- keterlibatan perempuan dalam perumusan program disebabkan oleh faktor masih rendahnya komposisi perempuan pada tingkat jabatan struktural yang ada di kelembagaan daerah, kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan perempuan dalam akses perumusan program, penetapan program dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kemampuan perempuan dalam menanggapi usulan bawahan mengenai program dan anggaran pembiayaan dalam pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah relatif masih lemah. Dominasi kaum laki-laki pada tingkatan jabatan struktural kelembagaan daerah mengakibatkan perempuan kurang memiliki ruang dan gerak yang luas untuk mempengaruhi penetapan kebijakan rumusan program pembangunan ekonomi oleh Satuan Kerja di Kabupaten Lampung Tengah.
 3. Walaupun tingkat pendidikan, keterampilan dan kecakapan perempuan selaku pimpinan pada struktur pemerintahan dan perumus/perancang usulan kegiatan/program tidak lebih rendah dari kaum laki-laki, akan tetapi keterbatasan akses perempuan menanggapi usulan, merumuskan program kebijakan dan menentukan kebijakan yang diputuskan, menyebabkan usulan kegiatan terkadang tidak berjalan, dan sumber daya perempuan di kelembagaan daerah seperti lebih ditempatkan sebagai alat pendukung dari kegiatan perumusan kebijakan pada suatu Satuan Kerja.
 4. Sampai saat ini kaum perempuan belum sepenuhnya mampu menempatkan diri untuk berpartisipasi secara aktif dalam perumusan kebijakan Kelembagaan Daerah dibidang pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Selain kurangnya pengetahuan, kemampuan dan pengalaman perempuan di kelembagaan daerah dalam hal pembangunan ekonomi daerah, masih rendahnya komposisi kaum perempuan pada jabatan struktural di kelembagaan daerah ternyata membatasi akses kemampuan, kewenangan dan kekuasaan perempuan untuk mempengaruhi keputusan dalam perumusan kebijakan yang diusulkan. Akibatnya kemampuan kaum perempuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan program yang

diusulkan menjadi kurang optimal. Dan dominasi kaum laki-laki sebagai pemegang jabatan struktural ternyata ikut berperan dalam melemahkan ruang dan gerak bagi perempuan untuk mampu berpartisipasi lebih aktif dan dinamis dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah.

2. Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis ingin mengimplikasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai potensi dan aset daerah dibidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sebaiknya komposisi perempuan pada jabatan struktural di kelembagaan daerah lebih ditingkatkan, sehingga terdapat adanya kesamaan hak dan kewenangan antara perempuan dan laki-laki dalam perumusan kebijakan pembangunan pada kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kaum perempuan hendaknya dapat lebih memperjuangkan posisi dan kedudukannya di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga akses perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah menjadi lebih luas.

3. Mengingat tingkat pendidikan, pengetahuan, kecakapan dan kemampuan kerja kaum perempuan di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah tidak jauh berbeda dan bahkan sama dengan kaum laki-laki, maka hendaknya Pemerintah Daerah dapat memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada aparatur perempuan untuk menduduki jabatan dalam struktur kelembagaan daerah.
4. Sebagai aset dan potensi dibidang sumber daya manusia hendaknya kaum perempuan diberikan tempat, ruang dan porsi yang sama dengan kaum laki-laki dalam perumusan kebijakan di kelembagaan daerah, dengan percepatan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah dapat lebih cepat tercapai sebagaimana diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung., 2007, *Statistik Jender dan Analisis Provinsi Lampung Tahun 2006*: Lampung.
- Cholil Abdullah., 2000, *Isu Gender dalam Pembangunan di Indonesia (Buku Fakta*; Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan United Nation Population Fund (UNFPA):Jakarta.

- Corner, L. (1997). "*Rural development and Poverty Alleviation in ASEAN, a Gender*, diterjemahkan oleh Sutopo Bahri: Jakarta.
- Entis dkk., 1999, *Metodologi Penelitian*, Unsri:Palembang.
- Hardjito Notopuro., 1979, *Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*, Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Instruksi Presiden RI., 1995, *Tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Didaerah*:Jakarta.
- Ihromi., 1994, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Gajah Mada Universitas Press:Yogyakarta.
- Koentjaraningrat., 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia:Jakarta.
- Liza Hadiz., 2004, *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*, LP3ES: Jakarta.
- Mansour Fakhri., 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah*: Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun Tahunn 2011, *Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah*: Lampung.
- Sa'id Al-Afghani., 2001, *Pimpinan Wanita Di Kancah Politik*, Pustaka Pelajar LP2EF: Surabaya.
- Singarimbun dan Effendi., 2003, *Metode Penelitian Survei*; LP3ES:Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi., 1986, *Metodologi Research*. Penerbit Fakultas Psikologi UGM:Yogyakarta.